

**PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, EFEKTIVITAS
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA DAERAH
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pemerintah Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2023)**

Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :
Arfani Marizka
NIM : 31402300132

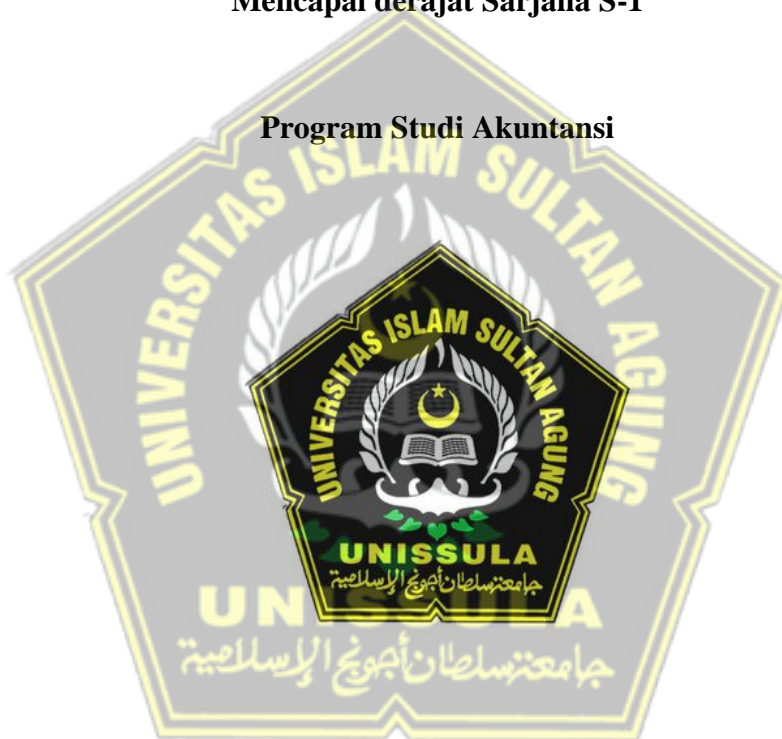
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2024

**PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, EFEKTIVITAS
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA DAERAH
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pemerintah Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2023)**

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Arfani Marizka

NIM : 31402300132

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2024**

SKRIPSI

**PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, EFEKTIVITAS
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA DAERAH
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pemerintah Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2023)**

Disusun Oleh :

ARFANI MARIZKA

NIM : 31402300132

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, September 2024
Pembimbing



Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Ak., CA
NIK: 211402010

**PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, EFEKTIVITAS
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Kasus Pemerintah Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2023)

Disusun Oleh:

Arfani Marizka

NIM. 31402300132

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 29 November 2024

Susunan Dewan Penguji

Penguji I

Penguji 2

Dr. Hj. Luluk M I, SE, MSi, Ak, CA, CSRS
NIK. 210403051

Sri Sulistyowati, SE, M.Si
NIK. 211403017

Pembimbing

Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Ak., CA
NIK 211402010

Usulan penelitian Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 29 November 2024

Ketua Program Studi Akuntansi

Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP.

NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arfani Marizka
NIM : 31402300132
Program Studi : S-1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul :

“Pengaruh Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2023)”.

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 29 November 2024

Yang Menyatakan,



Arfani Marizka
NIM. 31402300132

ABSTRAK

“Pengaruh Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2023)”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Fokus penelitian ini adalah pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019-2023. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator penting dalam mengukur sejauh mana suatu daerah mampu mengelola keuangannya secara efektif, efisien, dan berkesinambungan guna mendukung pembangunan daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan software statistik. Variabel independen meliputi kemandirian daerah, efektivitas PAD, dan belanja daerah, sementara variabel dependen adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan rasio keuangan tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan belanja daerah sangat penting dalam memperkuat kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan belanja daerah demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

“The Influence of Regional Independence, Effectiveness of Regional Original Income and Regional Expenditure (Case Study of City Government in Central Java 2019-2023)”

This research aims to analyze the impact of regional independence, the effectiveness of local revenue (PAD), and regional expenditure on the financial performance of local governments. The focus of this research is on city governments in Central Java Province during the period 2019-2023. The financial performance of local governments is an important indicator in measuring how effectively, efficiently, and sustainably a region can manage its finances to support regional development.

The data used in this study were obtained from the local government financial reports published by the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance. The method of analysis used is multiple linear regression analysis with statistical software. The independent variables include regional independence, effectiveness of PAD, and regional expenditure, while the dependent variable is the financial performance of local governments measured using certain financial ratios.

The results of the study indicate that regional expenditure has a positive and significant impact on the financial performance of local governments. This research concludes that increasing regional expenditure is crucial in strengthening the financial performance of local governments. These findings have practical implications for policymakers to enhance the management of regional expenditure to support sustainable development.

Keywords: Regional Independence, Effectiveness of Local Revenue, Regional Expenditure, Financial Performance of Local Governments.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik yang berjudul **“Pengaruh Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2023)”**. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan studi Strata Satu untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. terselesaikannya Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sudah sepatutnya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan hamnya-Nya dalam segala urusan.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu serta bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapat pengetahuan yang dapat digunakan dimasa yang akan datang.

5. Kepada Bapak Kendriyanto, Ibu Suliyanti, Ayu Dahniar Kusuma Indriyanti dan Andhika Rizki Priambodo selaku orangtua saya serta keluarga besar yang telah memberikan do'a, support baik dalam bentuk materi dan moral kepada saya dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Kepada Keluarga Inspektorat Kota Semarang yang selalu memberikan semangat, waktu, dukungan, bantuan dan do'a selama ini.
7. Terimakasih untuk teman-teman S-1 Akuntansi 2023 yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasanya masih ada keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan Skripsi ini, sehingga menimbulkan ketidak sempurnaan dalam Skripsi ini. Penulis menantikan kritik, saran juga pesan dari pembaca. Besar harapan penulis bahwa hasil Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, November 2024

Penulis,



Arfani Marizka
NIM. 31402300132

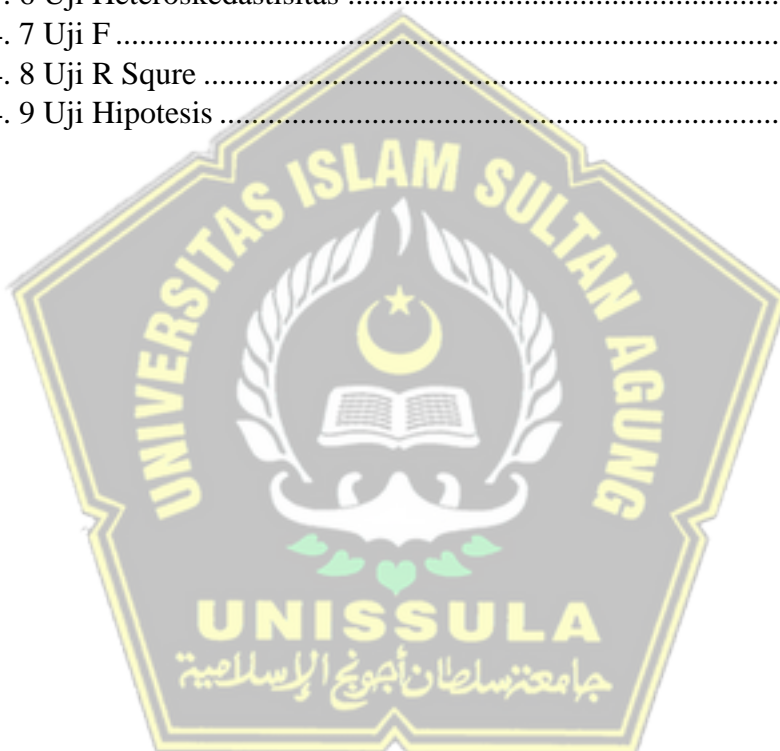
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	4
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	5
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	33
2.1 LANDASAN TEORI.....	33
2.1.1 <i>Teori Keagenan</i>	33
2.2 VARIABEL PENELITIAN.....	34
2.2.1 Kemandirian Daerah	34
2.2.2 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.....	34
2.2.3 Belanja Daerah.....	36
2.3 PENELITIAN TERDAHULU.....	37
2.3 PENGEMBANGAN HIPOTESIS	42
2.4.1 Hipotesis I	42
2.4.2 Hipotesis II.....	44
2.4.3 Hipotesis III.....	45
2.4 KERANGKA PENELITIAN	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 JENIS PENELITIAN	48
3.2 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN	48
3.2.1 Populasi Penelitian.....	48
3.2.2 Sampel Penelitian	48
3.3 SUMBER DAN JENIS DATA	49

3.4	METODE PENGUMPULAN DATA.....	49
3.5	DEFINISI VARIABEL DAN INDIKATOR.....	49
3.5.1	Variabel Independen	49
3.5.2	Variabel Dependen.....	49
3.6	METODE ANALISIS DATA.....	59
3.6.1	Analisis Deskriptif	59
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	60
3.6.3	Uji Kelayakan Model	61
3.6.4	Regresi Linear Berganda	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		64
4.1	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	64
4.2	ANALISIS DATA	59
4.2.1	Hasil Statistik Deskriptif	59
4.2.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	61
4.2.3	Hasil Uji Kelayakan Model.....	66
4.2.4	Hasil Regresi Linear Berganda.....	70
4.3	PEMBAHASAN.....	71
4.4.1	Hubungan Kemandirian Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada seluruh Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023..	71
4.4.2	Hubungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada seluruh Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023	73
4.4.3	Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada seluruh Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023..	74
BAB V PENUTUP		87
5.1	KESIMPULAN.....	87
5.2	IMPLIKASI	88
5.3	KETERBATASAN PENELITIAN.....	88
5.4	AGENDA PENELITIAN MENDATANG.....	89
DAFTAR PUSTAKA		90
LAMPIRAN		92

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3. 1 Variabel dan Indikator	58
Tabel 4. 1 Analisis Deskriptif	59
Tabel 4. 2 Uji Normalitas.....	62
Tabel 4. 3 Uji Autokorelasi.....	63
Tabel 4. 4 Uji Multikolinearitas	64
Tabel 4. 5 Kesimpulan Uji Multikolinearitas.....	64
Tabel 4. 6 Uji Heteroskedastisitas	65
Tabel 4. 7 Uji F	67
Tabel 4. 8 Uji R Square	68
Tabel 4. 9 Uji Hipotesis	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir	47
Gambar 4. 1 Scatterplot Dependent Variabel Y	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Variabel-Variabel	92
Lampiran 2 Tabel Uji dalam Aplikasi SPSS.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sasana (2011), UU No. 23 Tahun 2014 menetapkan otonomi daerah yang memuat hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengendalikan dan mengawasi sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Ketika PAD lebih tinggi dibandingkan transfer pusat, maka kemandirian fiskal dimulai. Dalam peringatan hari otonomi daerah ke-27 di Balai Pantai Losari, Makassar, Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Maju Tito Karnavian menyatakan, daerah bisa membiayai dirinya sendiri secara mandiri dari pemerintah pusat. Konsep otonomi daerah memungkinkan adanya pengembangan dan pembangunan daerah yang berbeda-beda oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Kemampuan daerah otonom untuk mengelola keuangannya sendiri secara efektif, termasuk PAD dan belanja daerah, merupakan indikator utama tingkat kemandiriannya, hal tersebut merupakan salah satu landasan yang mendasari pelaksanaan otonomi daerah. Apabila suatu daerah mampu mengurus sendiri urusan dalam negerinya tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat atau badan lainnya, maka daerah atau daerah tersebut dapat dikatakan mandiri. Kemandirian dalam bidang budaya, politik, dan ekonomi semuanya tercakup dalam hal ini. Untuk memberdayakan masyarakat lokal dan memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, kemandirian daerah menjadi sangat penting. Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih baik dan lebih efisien dapat terjadi sebagai hasilnya, seperti halnya peningkatan kreativitas dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk menentukan seberapa besar otonomi yang dimiliki setiap daerah dalam mengelola keuangannya sendiri, selain menerima sejumlah besar uang dari pemerintah pusat, salah satu cara untuk mengukur otonomi ini adalah dengan menghitung rasio kemandirian daerah. Sementara satu studi menemukan korelasi positif antara kinerja keuangan pemerintah daerah dan rasio kemandiriannya (Hamzah, 2007), studi lain gagal menemukan bukti bahwa kemandirian daerah memengaruhi kinerja keuangan (Hakiki et al., 2023).

Mampu mengelola PAD yang direncanakan dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan sesuai dengan potensi daerah yang sebenarnya merupakan bagian penting dari otonomi daerah yang baik (Halim, 2012). Dengan demikian, menurut Lathifa dan Haryanto (2019), sangat penting bagi pemerintah daerah untuk bekerja dalam meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan pendapatan daerah yang terus meningkat merupakan pertanda kinerja keuangan yang baik, dan pendapatan daerah dapat menyediakan dana yang diperlukan bagi pemerintah untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.

Berbagai penelitian telah berupaya untuk menarik kesimpulan tentang hubungan antara PAD dan kinerja keuangan daerah namun, meskipun satu penelitian (Machmud & Radjak, 2018) gagal menunjukkan pengaruh signifikan PAD terhadap kinerja keuangan daerah, penelitian lain (Lathifa & Haryanto, 2019), (Wahyudin & Hastuti, 2020), dan (Yasin, 2020) semuanya mendukung kesimpulan ini.

Pendanaan setiap daerah harus didistribusikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Pentingnya penyediaan sarana dan prasarana ditegaskan oleh UU No. 33 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa daerah yang sedang berkembang memerlukan anggaran yang lebih besar untuk investasi daerah. Untuk menyelenggarakan pemerintahan, menyediakan layanan publik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat daerah, pemerintah daerah mengeluarkan uang untuk berbagai kegiatan dan proyek. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, layanan sosial, dan bidang lainnya biasanya termasuk dalam anggaran ini. Sementara satu studi menemukan bahwa belanja modal memang memiliki dampak pada kinerja keuangan daerah (Nyoman et al., 2016), studi lain tidak menemukan dampak seperti itu (Wahyudin & Hastuti, 2020), yang menunjukkan bahwa ada beberapa perdebatan mengenai apakah belanja modal berhubungan secara signifikan dengan peningkatan kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk meneliti dampak otonomi daerah, efektivitas PAD, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Untuk meneliti lebih lanjut fenomena tersebut, penulis mempertimbangkan untuk melakukan menambahkan variabel baru yaitu Efektivitas PAD untuk mengetahui dampak variabel belanja daerah dan kemandirian daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini dan berbagai peneliti telah membuktikan atau gagal membuktikan hal tersebut **“Pengaruh Kemandirian Daerah, Efektivitas PAD dan Belanja Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2023)”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Meningkatkan kinerja keuangan daerah merupakan langkah krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mendorong kemajuan pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah perlu merumuskan strategi yang komprehensif dan terukur, serta melakukan analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah. Adanya perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya membuat penulis mengangkat kembali penelitian (Hakiki dkk., 2023) dimana dalam penelitian terdahulu mengangkat judul Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sekadau, sedangkan dalam penelitian ini penulis menambahkan variabel Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.

Dengan melakukan penelitian terkait pengaruh kemandirian daerah, efisiensi pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah, diharapkan mampu meningkatkan seluruh aspek yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Kota di Jawa Tengah pada Tahun Anggaran selanjutnya.

Oleh karena itu penelitian ini hendak menguji beberapa persoalan sebagai berikut:

- 1) Apakah kemandirian daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota di Jawa tengah tahun 2019-2023?
- 2) Apakah efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota di Jawa Tengah tahun 2019-2023?
- 3) Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota di Jawa Tengah 2019-2023?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Ada beberapa macam tujuan penelitian yaitu:

- 1) Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh kemandirian daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1) Manfaat Teoritis

Memperluas pemahaman pembaca tentang dampak kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.

2) Manfaat Praktis

- (1) Penulis memperoleh manfaat dari pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh, yang memungkinkannya untuk meningkatkan kualitas penulisan dalam penelitian selanjutnya.
- (2) Karya ini berfungsi sebagai landasan bagi akademisi masa depan yang tertarik pada subjek ini dengan menyediakan referensi atau ikhtisar untuk karya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 *Teori Keagenan*

Hubungan antara prinsipal dan agen, dimana agen melakukan suatu tindakan atas nama prinsipal dijelaskan oleh teori keagenan. Teori keagenan dapat digunakan untuk melaksanakan APBD di lingkungan masyarakat dan pemerintahan. Kekhawatiran dasar teori keagenan adalah konflik kepentingan prinsipal-agen dan asimetri informasi. Prinsipal menunjuk seorang agen untuk bertindak atas namanya, dan agen pada gilirannya menerima kekuasaan dari prinsipal. Masyarakat adalah prinsipal dan pemerintah daerah adalah agen dalam kerangka pemerintahan.

Legislatif mendelegasikan kewenangan kepada lembaga administratif untuk menyusun APBD selama satu tahun, dan kedua majelis Kongres meratifikasinya bersama-sama. Eksekutif dan agen bertanggung jawab untuk memberikan nasihat mengenai anggaran, melaksanakannya, dan menggunakannya secara maksimal (Smith & Bertozzi, 1998, dikutip dalam Nyoman dkk., 2016). Sulit bagi prinsipal untuk memantau dan mengevaluasi kinerja agen karena kurangnya informasi yang dimiliki agen.

2.2 VARIABEL PENELITIAN

2.2.1 *Kemandirian Daerah*

Otonomi fiskal atau kemandirian keuangan daerah adalah dua cara untuk melihat hal yang sama: kinerja daerah dari segi uang. Jika suatu daerah mandiri

secara finansial, berarti daerah tersebut mampu membiayai sendiri operasional pemerintahan, program pembangunan, dan pelayanan publiknya. Namun hal ini juga berarti bahwa masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan daerah; semakin mandiri suatu daerah secara finansial, maka semakin banyak penduduknya membayar retribusi dan pajak daerah. PAD terdiri dari retribusi dan pajak.

Rasio kemandirian sebagaimana dikemukakan oleh Hamzah (2007) membandingkan PAD dengan bantuan/pinjaman pusat (transfer). Rasio yang lebih tinggi menunjukkan berkurangnya ketergantungan pada pihak eksternal dan digunakan sebagai ukuran kemandirian daerah.

2.2.2 Efektivitas PAD

Penjualan barang atau pemberian jasa (fee), bunga, dividen, royalti, sewa, dan istilah serupa lainnya semuanya mengacu pada hal yang sama: pendapatan. Pendapatan seseorang adalah uang yang diperolehnya dari pekerjaannya.

(Stice, Skousen, 2004, 230) Berikut adalah bagaimana pendapatan didefinisikan oleh FASB: Pendapatan unit bisnis adalah uang yang masuk atau berpindah tangan sebagai akibat dari penjualan barang atau penyediaan jasa, atau dari aktivitas lain yang penting bagi perusahaan. operasi unit yang sedang berjalan. Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai nilai aset unit dikurangi nilai utangnya, atau gabungan keduanya.

Menurut pasal 1 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, berikut ini yang merupakan komponen-komponen PAD pendapatan yang diterima daerah dan dikumpulkan sesuai dengan ketentuan daerah dan peraturan perundang-undangan:

- Pajak Daerah;
- Retribusi Daerah;
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- Lain-lain PAD yang sah, tersusun atas:
 - hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - jasa giro;
 - pendapatan bunga;
 - keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pendayagunaan PAD yang dimiliki daerah secara baik sangat penting bagi penatausahaan seluruh potensi PAD yang dihimpun oleh Pemerintah Daerah. Kapasitas untuk memberikan layanan masyarakat merupakan indikator kunci apakah suatu organisasi sektor publik menjalankan operasinya secara efektif atau tidak, ini dikatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Welly dan Djuniar. Pendapatan menunjukkan kemampuan daerah dalam menghimpun dana sesuai tujuan, sedangkan rasio efektivitas menilai selisih antara pendapatan PAD aktual dan pendapatan PAD yang diharapkan.

2.2.3 Belanja Daerah

Untuk lebih jelasnya, belanja daerah yang dimaksud adalah seluruh komitmen Pemerintah Daerah yang dipotong dari nilai kekayaan bersih pada periode tahun anggaran yang sesuai, sesuai Peraturan Pemerintah no. 12 tahun 2019 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, segala pengeluaran yang diakui sebagai pengurang ekuitas dan wajib dibayar kembali oleh daerah dalam waktu satu tahun anggaran, termasuk dalam belanja daerah.

Bagian Kesatu Pasal 55 (1) Yang dimaksud dengan Klasifikasi Belanja Daerah adalah:

- a. Belanja operasional adalah biaya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dianggarkan sehari-hari
- b. Pengeluaran untuk tujuan modal adalah biaya yang dianggarkan untuk memperoleh aset tetap dan aset lain yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi
- c. Pengeluaran untuk kebutuhan yang tidak terduga, termasuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, merupakan biaya yang dianggarkan dalam APBD.
- d. Dana ditransfer apabila Pemerintah Daerah mengeluarkan uang kepada Pemerintah Daerah lain atau kepada pemerintah desa.

Komponen utama pengelolaan APBD adalah belanja daerah; menurut penelitian (Nyoman et al., 2016), belanja modal yang terencana dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesuksesan finansial. Untuk memprioritaskan belanja yang dianggarkan dengan mempertimbangkan program dan prioritas pembangunan daerah serta mematuhi peraturan terkait, alokasi belanja modal yang efektif dibandingkan total belanja harus lebih tinggi.

2.3 PENELITIAN TERDAHULU

Untuk memperkuat teori yang digunakan untuk mengevaluasi penelitian ini, tinjauan literatur ini berfungsi sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel dan Metode Analisis	Hasil Pengamatan
1	Doni Hakiki, Tumija dan Ika Agustina (2023) Volume 10 Nomor 1 Juni 2023	Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau	Variable Indepen (X) X1 : Rasio Kemandirian X2 : Belanja Daerah Variable Dependen (Y) : Kinerja Keuangan pemerintah Daerah	Hasil Penelitian adalah sebagai berikut: 1. Tingginya rasio kemandirian daerah yang dilihat dari persentase nilai rasio kemandirian daerah belum mampu membuat peningkatan pada nilai kinerja keuangan 2. Rasio pengelolaan belanja daerahnya yang tinggi, maka nilai kinerja keuangan pemerintah daerahnya menjadi rendah, dan semakin kecil nilai rasio pengelolaan belanja daerahnya maka semakin tinggi pula nilai kinerja keuangan pemerintah daerah 3. Secara simultan (bersama) Variabel X1 (Rasio Kemandirian Daerah) dan Variabel X2 (Belanja Daerah) berpengaruh terhadap Variabel Y (kinerja keuangan daerah Kabupaten Sekadau) dengan pengaruh sebesar 99,6%.
2	Desak Nyoman Yulia Astiti dan Ni Putu Sri Harta Mimba (2016) Volume 14 Nomor 3 2016	Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variable Independen (X) X1 : Belanja Rutin X2 : Belanja Modal Variabel Dependen (Y) : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Penelitian adalah sebagai berikut: 1. Belanja rutin tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah (belanja rutin banyak dialokasikan untuk belanja pegawai sehingga manfaatnya tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat 2. Belanja modal berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah, Pengalokasian belanja modal secara tepat dapat berkontribusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah

3	Hamzah, 2007	Analisa Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan : Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Propinsi Jawa Timur Periode 2001-2006)	Variable Eksogen: rasio kemandirian1, rasio kemandirian2, rasio efektifitas dan rasio efisiensi Variable Eksogen dan endogen : pertumbuhan ekonomi Variable Endogen : Kemiskinan dan Pengangguran	Hasil Penelitian adalah sebagai berikut: 1. Hasil pengujian secara langsung antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan rasio kemandirian1, rasio kemandirian2, dan rasio efisiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektifitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran menunjukkan terdapat pengaruh secara positif, sedangkan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan terdapat pengaruh secara negatif. 2. Pada pengujian secara tidak langsung antara kinerja keuangan dengan pengangguran dan kemiskinan menunjukkan rasio kemandirian1, rasio kemandirian2, dan rasio efisiensi secara tidak langsung berpengaruh terhadap pengangguran dan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.
4	Cok Istra Nilam Kencana Ningrat dan Ni Luh (2019) Supadmi Volume 29 Nomor 2 November 2019	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Dependen (X) X1: Pendapatan Asli Daerah X2: Belanja Modal Variable Independen (Y): Kinerja Keuangan Pemerintah	1. Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal pada kinerja keuangan serta dapat mengkonfirmasi teori distribusi khususnya pada pendapatan asli daerah yakni dalam mendistribusikan pendapatan secara merata ke OPD. Semakin Tingginya penerimaan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah sehingga hal tersebut berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah
5	Joice Machmud dan Lukfiah Irwani Rudjak Volume 2 Nomor 1, Januari 2018	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo	Variabel Independen (X) X1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2: Dana Alokasi Umum (DAU) X3: Dana Alokasi Khusus (DAK) Variabel Dependen (Y): Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	1. PAD tidak berpengaruh signifikan pada KKD 2. DAU tidak berpengaruh signifikan pada KKD 3. DAK memiliki pengaruh signifikan pada KKD 4. Secara simultan berpengaruh signifikan pada KKD

6	Hasna Lathifa, Haryanto Volume 8 Noor 2, Tahun 2019	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/kota di Procinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017	Varibel Independen (X) X1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 : Belanja Modal Variabel Dependen (Y) : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	1. PAD berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan 2. Belanja Modal berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 3. secara bersama sama PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
7	Muhammad Yasin, Tahun 2020	Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur	Varibel Independen (X) X1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 : Belanja Pembangunan Variabel Dependen (Y) : Pertumbuhan Ekonomi	1. PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Belanja Pembangunan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
8	Afi Maulina, Mustafa Lkamal dan Nabilla Salsa Fahira Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Varibel Independen (X) X1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 : Dana Perimbangan X3 : Belanja Modal X4 : Ukuran Pemerintah Daerah Variabel Dependen (Y) : Kinerja Keuangan Daerah	1. variabel PAD dan Dana Perimbangan menunjukkan hubungan positif dan hasil signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 2. variabel belanja modal dan ukuran pemerintah daerah menunjukkan hubungan positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
9	Ihsan Wahyudin dan Hastuti Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat	Varibel Independen (X) X1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 : Dana Perimbangan X3 : Belanja Modal Variabel Dependen (Y) : Kinerja Keuangan Daerah	1. PAD berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan daerah 2. Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah 3. Belanja Modal berpengaruh Positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 3. secara bersama sama PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.3 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Mengikuti rumusan masalah dan kaitannya selanjutnya dengan teori-teori yang ada saat ini, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

2.4.1 Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Konsep kunci dalam teori keagenan adalah peran agen dalam melaksanakan kehendak prinsipal, dalam hal ini pemerintah daerah (Nyoman et al., 2016). Ketika suatu daerah mampu mengambil keputusan dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kebutuhannya sendiri, dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah

pusat, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut mandiri. Dengan adanya PAD yang lebih besar dibandingkan transfer dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, pemerintah daerah akan mampu menjadi lebih mandiri. Sebaliknya, pelaku memerlukan mekanisme yang terbuka dan transparan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja agen, seperti laporan publik dan audit independen, yang sejalan dengan akuntabilitas pengelolaan sumber daya tersebut.

Karena otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menangani aset moneter dan non-moneter, terdapat korelasi yang kuat antara kinerja keuangan daerah dan kemandirian daerah. Salah satu indikator utama otonomi daerah adalah bagian pendapatan daerah yang dihasilkan dari PAD. Contoh sumber PAD dan poin penting dalam kinerja keuangan daerah. cara menangani keuangan secara efektif, memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengeluarkan uang untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakatnya.

Menurut Groves dkk. dalam Ningsih (2010), terdapat beberapa elemen yang tentunya berdampak pada kemandirian daerah. Elemen-elemen ini berdampak pada lingkungan, kesejahteraan, dan keuangan. Karena pengaruhnya yang baik terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah, maka interaksi antar unsur-unsur tersebut mempengaruhi otonomi daerah. Oleh karena itu, hipotesis kerja penelitian ini sebagai berikut

H1 : Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

2.4.2 Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Nyoman dkk. (2016), teori keagenan berpusat pada peran pemerintah daerah sebagai agen yang mengambil keputusan dan mengelola sumber daya atas nama masyarakat, yaitu prinsipal. Untuk mendanai berbagai inisiatif pelayanan publik, PAD harus dikelola dan dioptimalkan oleh pemerintah daerah, oleh karena itu, pembangunan dan kesejahteraan dapat memperoleh manfaat dari PAD yang dikelola dengan baik.

PAD yang sukses adalah PAD yang memungkinkan pemerintah daerah mengumpulkan dan menangani dana yang berasal dari dalam negerinya secara efisien. Seberapa baik pemerintah daerah menggunakan anggarannya untuk mendanai layanan publik dan memenuhi target pembangunan merupakan indikator kinerja keuangan yang baik. Pemerintah daerah dapat memperluas kemampuannya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah apabila berhasil memperolehnya sesuai target yang telah ditetapkan.

Mendukung temuan (Lathifa & Haryanto, 2019) dan (Yasin, 2020) yang menunjukkan bahwa peningkatan PAD menyebabkan peningkatan kinerja keuangan daerah, pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya, ketika pendapatan daerah meningkat maka pemerintah daerah akan lebih mampu mengelola keuangan daerahnya. Jadi, hipotesis kerja penelitian ini adalah:

H2 : Efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah

2.4.3 Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Nyoman dkk. (2016), teori keagenan berpusat pada peran pemerintah daerah sebagai agen yang mengambil keputusan dan mengelola sumber daya atas nama masyarakat, yaitu prinsipal. Pemerintah, sebagai agen, bertanggung jawab mengalokasikan dana untuk berbagai inisiatif sedemikian rupa sehingga memberikan dampak yang maksimal terhadap masyarakat.

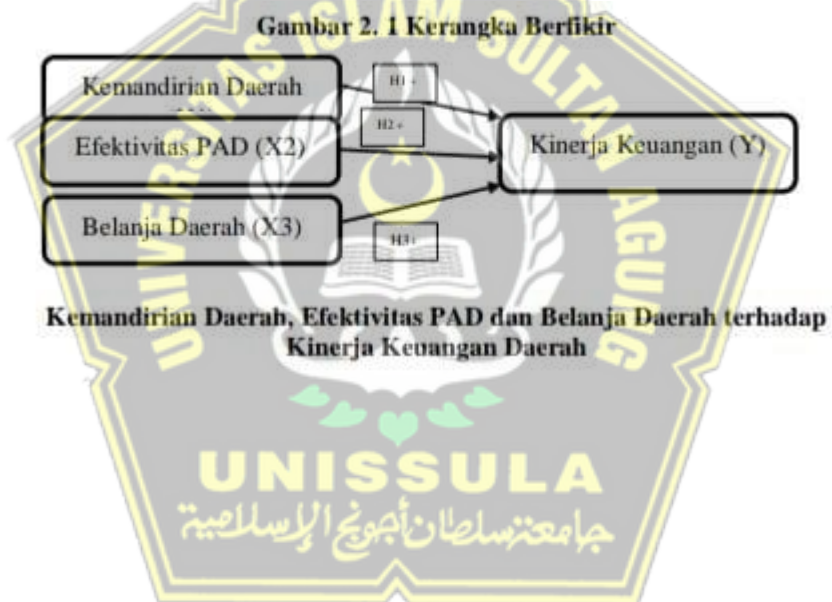
Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan belanja daerah yang ditargetkan. Artinya, dana daerah harus dialokasikan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Hal ini dapat dicapai melalui belanja yang efisien, pelayanan publik yang lebih baik, stabilitas fiskal, akuntabilitas, transparansi, pengendalian anggaran yang efektif, inovasi, dan pembangunan infrastruktur. Tercapainya tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bergantung pada pengelolaan pengeluaran yang bijaksana dan efektif.

Peningkatan atau penurunan belanja daerah akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah, menurut penelitian sebelumnya (Hakiki et al., 2023). Namun hubungan ini tidak searah. Belanja daerah mempengaruhi stabilitas keuangan daerah, yang tidak terlepas dari pengelolaan APBD untuk keberhasilan dan kesejahteraan daerah dari sudut pandang keuangan, sehingga memungkinkan terjadinya hubungan yang kuat tersebut. Jadi, hipotesis kerja penelitian ini adalah

H3 : Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

2.4 KERANGKA PENELITIAN

Kerangka penelitian memberikan gambaran pola interaksi antar variabel. Mengevaluasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi strategi pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk menjawab kesulitan-kesulitan seperti dinamika perekonomian, perubahan kebijakan fiskal, dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas. Grafik berikut akan memberikan kerangka untuk memahami keterkaitan antara tiga variabel kinerja keuangan: kemandirian daerah, efektivitas PAD dan belanja daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Kasiram (2008) menyatakan penelitian kuantitatif adalah metode memperoleh pengetahuan dengan menganalisis informasi tentang suatu topik dengan menggunakan data numerik.

3.2 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

3.2.1 Populasi Penelitian

Untuk menarik kesimpulan dari penelitian, populasi didefinisikan sebagai kumpulan besar individu yang memiliki karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti (Ghozali, 2013). Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh pemerintah kota di Jawa Tengah.

3.2.2 Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik sampling Jenuh, yaitu pemilihan sampel berdasarkan premis bahwa setiap anggota populasi dipertimbangkan. Hal ini merupakan praktik yang umum dilakukan pada populasi yang jumlahnya kecil (Sugiyono, 2017). Kutipan ini mendasari keputusan penulis untuk melakukan penelitian terhadap setiap pemerintahan kota di Jawa Tengah.

3.3 SUMBER DAN JENIS DATA

Abdullah dkk. (2021), data sekunder diartikan sebagai informasi yang dikumpulkan dari sumber lain yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder yang diambil dari website Kementerian Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id).

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan pendekatan dokumentasi dan studi literatur sebagai sarana pengumpulan informasi.

3.5 DEFINISI VARIABEL DAN INDIKATOR

3.5.1 Variabel Independen

Nikmatur (2017) menjelaskan bahwa variabel bebas/ Independent variable adalah variabel yang nilainya mempengaruhi perubahan variabel dependen (variabel terikat) Dalam penelitian terdapat 3 variabel bebas yaitu Kemandirian Daerah (X1), Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (X2) dan belanja daerah (X3).

3.5.2 Variabel Dependen

Nikmatur(2017) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan variabel terikat/dependent variabel adalah variabel yang nilainya dipengaruhi atau tergantung pada nilai variabel independen (variabel bebas), dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Kinerja Keuangan Daerah (Y)

Tabel 3. 1 Variabel dan Indikator

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Variabel Dependen			
1	Kinerja Keuangan Daerah (Y)	Kinerja Keuangan Daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku (Halim, 2007) Sehingga semakin rendah presentase menunjukkan adanya efisiensi dalam kinerja keuangan daerah	$KKD = \frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$
Variabel Independen			
1	Kemandirian Daerah (X1)	Kemandirian suatu daerah dengan membandingkan antara besaran realisasi PAD dengan penerimaan daerah yang bersumber pada pendapatan lain (contoh bantuan pemerintah dan pinjaman (DAU dan DAK), dengan formula sebagai berikut (Hakiki, et al. 2023) Sehingga semakin besar rasio kemandirian ini menunjukkan kemampuan daerah mendapatkan pendapatannya	$RKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat}} \times 100$
2	Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (X2)	Kemampuan Pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2014) Sehingga semakin besar presentase yang muncul menunjukkan tingginya kemampuan daerah untuk merealisasikan target PAD nya	$EPAD = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100$
3	Belanja Daerah (X3)	Belanja Daerah dikatakan tepat apabila belanja modal dianggarkan sesuai sehingga dapat berkontribusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus meningkatkan kinerja keuangan. (Nyoman et al., 2016) Sehingga jika presentase yang muncul semakin besar, maka semakin baik	$BD = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$

3.6 METODE ANALISIS DATA

3.6.1 Analisis Deskriptif

(Sugiyono, 2017) mengatakan saat menganalisis data, statistik deskriptif berguna karena memungkinkan seseorang menggeneralisasi dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Statistik deskriptif digunakan dalam kajian penelitian.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Perlu dilakukan verifikasi bahwa persamaan pengolahan model dalam model regresi memenuhi standar ekonometrik.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Mengetahui apakah data mengikuti distribusi normal sangat penting untuk memperoleh hasil uji asumsi klasik yang andal. Data diperiksa normalitasnya dengan menggunakan banyak metode, salah satunya adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov mengasumsikan data berdistribusi normal apabila nilai $\text{asyp.sig (2-tailed)} > 0,05$.

3.6.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model prediksi berkorelasi dengan perubahan waktu. Dengan asumsi nilai asymp tercapai, uji coba dapat dijalankan. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak berkorelasi karena $\text{Sig (2-tailed)} > 0,05$.

3.6.2.3 Uji Multikolinearitas

Saat mencari tanda-tanda korelasi antar variabel independen, uji multikolinearitas adalah cara yang tepat. Model regresi tidak menunjukkan tanda-tanda multikolinearitas jika menurut hasil uji multikolinearitas nilai Tolerance lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF kurang dari 10.

3.6.2.4 Uji Heteroskedastitas

Jika residu dari berbagai pengamatan dalam model regresi mempunyai varian yang tidak sama, maka analisis heteroskedastisitas akan mengungkapkannya. Untuk ujian ini, tes glesjer dan scatter plot digunakan. Hasil

uji scatter plot dapat digunakan untuk menentukan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas atau varians residual antar data sama jika titik-titiknya tidak mengelompok secara pasti. Uji Glesjer menunjukkan bahwa tidak terdapat kesamaan antar data pada variance residual model regresi jika variabel independen mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

3.6.3 Uji Kelayakan Model

3.6.3.1 Uji R Square

Untuk menilai derajat kesesuaian antara dua variabel adalah dengan koefisien determinasi yang sering disebut dengan modifikasi R square. Uji koefisien determinasi memberikan hasil berkisar antara 0% sampai dengan 100%.

3.6.3.2 Uji F

Untuk menentukan apakah banyak variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, ahli statistik menggunakan uji F. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka uji F dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.3.3 Uji T

Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat diuji secara terpisah dengan menggunakan uji t. Variabel independen dianggap mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel dependen apabila nilai t hitung melebihi nilai t tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05.

3.6.4 Regresi Linear Berganda

Dengan menganalisis nilai historis faktor independen dan variabel dependen, regresi linier berganda dapat menentukan apakah variabel dependen bergantung pada salah satu variabel independen dan, jika demikian, bagaimana caranya. Persamaan mengikuti evaluasi ini:

$$\text{KKD} = \alpha + \beta_1 \text{RKD} + \beta_2 \text{EPAD} + \beta_3 \text{BD} + \epsilon$$

Dimana:

KKD	: Kinerja Keuangan Daerah
α	: Konstanta
RKD	: Rasio Kemandirian Daerah
EPAD	: Efektivitas PAD
BD	: Belanja Daerah
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi
ϵ	: Error

Uji asumsi klasik (seperti normalitas, autokorelasi, dan multikolinearitas) dan uji kelayakan model (seperti R², F, dan Hipotesis) akan dijalankan menggunakan model ini.

Sehubungan dengan setiap koefisien regresi, hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya adalah:

H₀ : $\beta = 0$ (Tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen X terhadap variabel dependen Y)

H₀ : $\beta \neq 0$ (Ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen X terhadap variabel dependen Y)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Provinsi Jawa Tengah terletak pada 108° sampai 111° Bujur Timur dan 6° sampai 8° Lintang Selatan. Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan beberapa daerah tetangga. Perbatasan utara provinsi ini dengan Laut Jawa membuka kemungkinan perdagangan maritim. Kemudian di sebelah barat berbatasan darat dengan Provinsi Jawa Barat yang mempunyai kepentingan strategis bagi distribusi dan transportasi sumber daya perekonomian.

Enam kota yang termasuk dalam wilayah provinsi Jawa Tengah adalah Magelang, Pekalongan, Salatiga, Semarang, Surakarta, dan Tegal semuanya menjadi sasaran pengujian sebagai bagian dari penelitian ini. Pengambilan sampel jenuh digunakan sebagai teknik pengambilan sampel. Laporan Realisasi Anggaran 2019–2023 seluruh kota yang diaudit menjadi dasar data penelitian ini. Tiga puluh titik data dianggap sebagai ukuran sampel untuk penyelidikan ini.

4.2 ANALISIS DATA

4.2.1 Hasil Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk mencari nilai maksimum dan minimum, rata-rata, dan standar deviasi masing-masing variabel. Gambaran Hubungan Variabel Dependen dengan Variabel Independen Efektivitas PAD, Belanja Daerah, dan Kemandirian Daerah Penelitian ini menggunakan data deskriptif untuk menunjukkan kinerja keuangan daerah. Statistik deskriptif seluruh variabel ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian Daerah	30	33,06	144,46	1820,71	60,6903	32,56991
Efektivitas PAD	30	80,05	171,29	3109,75	103,6583	20,80486
Belanja Daerah	30	8,07	27,34	503,31	16,7770	4,68619
Kinerja Keuangan Daerah	30	72,06	94,32	2502,83	83,4277	6,36062
Valid N (listwise)	30					

Tabel 4.7 menampilkan hasil analisis statistik deskriptif; N adalah jumlah Berikut penjelasan dari poin-poin data tersebut:

- (1) Analisis statistik deskriptif ini mengungkap nilai rata-rata sebesar 60,6903 untuk Variabel Independen Kemandirian Daerah. Rentang nilai yang mungkin adalah dari 33,06 sampai dengan 144,46. Dengan rasio kemandirian daerah rata-rata sebesar 60,6903 suatu situasi di mana PAD lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh dari pusat jelas bahwa mayoritas pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah sangat otonom. Namun, simpangan bakunya adalah 32,56991. Karena simpangan baku variabel kemandirian daerah lebih kecil dari rata-rata atau rerata, dapat menyimpulkan bahwa variasi data mengenai norma subjektif berada dalam rentang normal.

- (2) Analisis statistik deskriptif ini mengungkap nilai rata-rata sebesar 103,6583 untuk variabel independen efektivitas PAD. Selanjutnya, berkisar dari terendah 80,05 sampai tertinggi 171,29. Berdasarkan ukuran sampel, tampak bahwa lebih banyak kota di provinsi Jawa Tengah yang mampu mencapai sasaran pendapatan daerahnya, melampaui target yang ada. Nilai rata-rata sebesar 103,6583 menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah kota di provinsi ini telah berhasil memenuhi target pendapatannya. Selain itu, simpangan bakunya adalah 20,80486. Variabilitas data dinormalisasi karena simpangan baku variabel efektivitas pendapatan daerah asli lebih kecil dari nilai rata-rata atau rerata.
- (3) Statistik deskriptif mengungkapkan bahwa variabel independen belanja daerah memiliki nilai rata-rata 16,7770. Rentang nilai yang mungkin adalah dari 8,07 hingga 27,34. Belanja modal telah digunakan oleh sebagian besar pemerintah kota di provinsi Jawa Tengah, dengan porsi yang layak kurang dari 30%. Selain itu, simpangan bakunya adalah 4,68619. Karena simpangan baku variabel belanja daerah kurang dari rerata, dapat menyimpulkan bahwa variasi data untuk variabel transformasi digital berada dalam rentang yang normal.
- (4) Analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel dependen kinerja keuangan daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 83,4277. Kemudian, nilai rata-ratanya dapat mencapai 94,32 dan terendah 72,06. Rata-rata rasio di Provinsi Jawa Tengah adalah 83,4277, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah kurang efisien. Rasio yang lebih kecil menunjukkan kinerja keuangan daerah yang lebih baik. Sebaliknya, standar deviasi berada pada

angka 6,36062. Terdapat variasi data dalam norma subjektif dalam jumlah yang normal, yang ditunjukkan oleh nilai standar deviasi variabel Kinerja Keuangan Daerah yang lebih kecil dari nilai rata-rata.

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1 Uji Normalitas

Ghozali menyatakan bahwa Anda dapat mengetahui apakah variabel sisa atau variabel pengganggu model regresi mengikuti distribusi normal dengan melakukan uji normalitas. Uji normalitas ini menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov, yang menetapkan bahwa tingkat signifikansi yang lebih tinggi dari 0,05 diperlukan untuk mengklasifikasikan data sebagai terdistribusi normal. Hasil uji normalitas menunjukkan hal tersebut:

Tabel 4. 2 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		30	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.05062481	
Most Extreme Differences	Absolute	.143	
	Positive	.094	
	Negative	-.143	
Test Statistic		.143	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.120	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.113	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.104
		Upper Bound	.121

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 1314643744.

Nilai asymp dapat dilihat pada hasil uji normalitas. Sig (2-tailed)=0,120>0,05, maka data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.3.2.2 Uji Autokorelasi

Dalam model regresi linier, Ghozali (2017) menjelaskan bahwa uji autokorelasi ini digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan error periode t dan periode $t-1$. Menggunakan run test pada data asymp yang diperoleh akan menunjukkan adanya autokorelasi. Variabel independen dapat dikatakan tidak berhubungan karena Sig (2-tailed) $> 0,05$. Seperti inilah hasil analisis autokorelasi:

Tabel 4. 3 Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.00602
Cases < Test Value	15
Cases ≥ Test Value	15
Total Cases	30
Number of Runs	13
Z	-.929
Asymp. Sig. (2-tailed)	.353

Dari temuan uji autokorelasi terlihat jelas bahwa nilai asymp adalah 0,353. Hasil penyelidikan ini tidak menunjukkan tanda-tanda autokorelasi, karena tingkat signifikansi (Sig 2-tailed) sebesar $0,353 > 0,05$.

4.3.2.3 Uji Multikolinearitas

Ghozali (2018) Suatu model regresi dikatakan mempunyai gejala multikolinier apabila variabel-variabel terikatnya memiliki korelasi yang tinggi dengan variabel independennya, sedangkan model regresi yang baik adalah yang variabel-variabel terikatnya tidak berkorelasi sama sekali. Pengujian terhadap VIF dan nilai toleransi memungkinkan dilakukannya uji multikolinearitas. Model penelitian dianggap bebas gejala multikolinearitas jika nilai VIF < 10 dan nilai toleransi $> 0,10$. Uji multikolinearitas kami menghasilkan temuan berikut:

Tabel 4. 4 Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Coefficients ^a		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Standardized Coefficients				Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.090	.289		17.595	.000		
	X1	-.022	.025	-.124	-.902	.375	.902	1.109
	X2	-.017	.056	-.042	-.312	.757	.928	1.078
	X3	-.179	.035	-.705	-5.185	.000	.917	1.091

a. Dependent Variable: Y

Tabel di bawah ini merangkum temuan uji multikolinearitas:

Tabel 4. 5 Kesimpulan Uji Multikolinearitas

VARIABEL	TOLERANCE	BATAS	VIF	BATAS	KESIMPULAN
X1	0,902	>0,1	1,109	<10	Tidak terjadi multikolinearitas
X2	0,928	>0,1	1,078	<10	Tidak terjadi multikolinearitas
X3	0,917	>0,1	1,091	<10	Tidak terjadi multikolinearitas

4.3.2.4 Uji Heteroskedastisitas

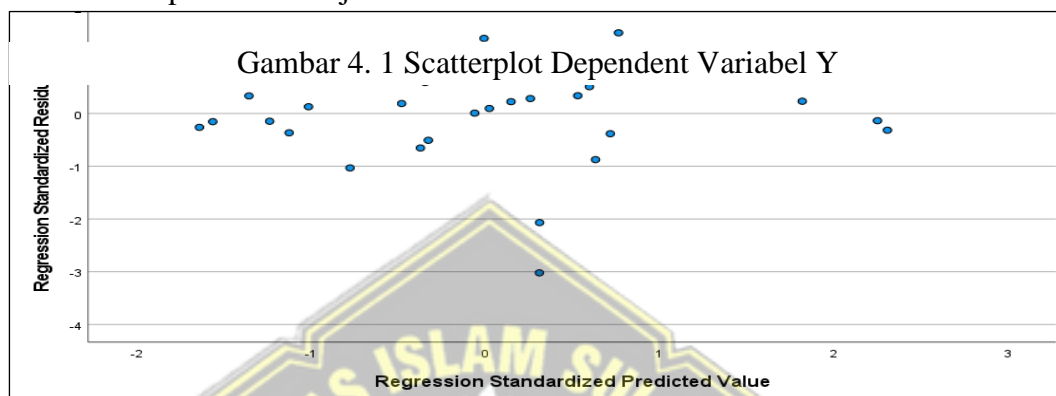
Ghozali (2017), Jika model regresi terdapat variansi yang tidak sama pada seluruh sisa pengamatan, maka akan dilakukan uji heteroskedastisitas. Memiliki nilai yang identik dalam model regresi menyebabkan munculnya heteroskedastisitas. Idealnya, residu dalam model regresi tetap konstan di seluruh observasi. Dengan melakukan regresi variabel independen terhadap nilai absolut residu maka metode Glejser dapat digunakan untuk melakukan uji heteroskedastisitas. Setelah mempertimbangkan nilai signifikan lebih besar dari 0,05, keputusan diambil berdasarkan tidak adanya gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Sebaliknya jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4. 1 Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Coefficients ^a		t	Sig.
	B	Std. Error	Standardized Coefficients			
1	(Constant)	.052	.202		.258	.799
	X1	-.003	.017	-.039	-.189	.852
	X2	.006	.039	.031	.151	.881
	X3	-.011	.024	-.094	-.463	.648

a. Dependent Variable: ABS_RES

Dari hasil pengujian diketahui nilai signifikan dari seluruh variabel X1,X2 dan X3 diatas $> 0,05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada data yang digunakan di penelitian ini. Grafik scatterplot seperti di bawah ini dapat digunakan untuk menampilkan hasil uji heteroskedastisitas.



Sebaran titik tersebut memberikan bukti uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser. Data penelitian menunjukkan pola scatterplot yang polanya tidak terlihat, menyebar secara acak di atas dan di bawah garis nol. Hasilnya menunjukkan bahwa data penelitian bebas dari heteroskedastisitas.

4.2.3 Hasil Uji Kelayakan Model

Karena kesederhanaannya dan kekuatannya yang kuat dalam menggambarkan pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen, maka metode analisis ini merupakan salah satu analisis yang paling banyak digunakan. Eksperimen ini dapat dilakukan dengan cara berikut:

4.3.3.1 Uji F

Mengetahui apakah variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) secara simultan merupakan tujuan utama dari uji F. Untuk melakukan pengujian ini, nilai F dan sig dibandingkan. Berdasarkan perhitungan, nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi (sig.) dan F tabel yang berarti estimasi model

regresi linier layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

Uji F yang mengandalkan perhitungan manusia dengan tabel F:

1. Terdapat pengaruh simultan variabel x terhadap variabel Y apabila nilai signya $< 0,05$ atau F hitung $> F$ tabel.
2. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ atau F-hitung $< F$ -tabel, maka variabel x tidak mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel Y.

F tabel = F (k ; n - k)

k : jumlah variabel bebas

n : jumlah sampel

Dari hasil perhitungan tersebut mengetahui tabel F:

F (3 ; 30-3)

F (3 ; 27) = 2,96

Berikut nilai-nilai yang keluar dari pengujian:

Tabel 4. 7 Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1. Regression	.094	3	.031	10.988	.000 ^b
Residual	.074	26	.003		
Total	.169	29			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 X2 dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $10,988 > F$ tabel 2,96 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan terhadap variabel terikat kinerja keuangan daerah (Y) terdapat pengaruh variabel bebas kemandirian daerah (X1), Efektivitas PAD (X2) dan Belanja Daerah (X3).

4.3.3.2 Uji R^2

Jika ingin mengetahui mengapa beberapa variabel independen mempunyai pengaruh yang lebih besar atau lebih kecil terhadap variabel dependen dibandingkan variabel lainnya dapat menghitung kontribusi relatifnya dengan menghitung koefisien determinasi. Dari hasil pengujian didapatkan tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Uji R Square

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.748 ^b	.559	.508	.05347	1.426

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Variabel independen meliputi kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli dan belanja daerah, memiliki pengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan daerah sebesar 50,8% jika melihat tabel diatas, dimana nilai Adjusted R square sebesar 0,508. Sedangkan sisanya sama dengan 49,2%. menggambarkan bahwa faktor-faktor yang tidak dimasukkan dalam studi ini dapat berdampak pada kinerja keuangan daerah.

4.3.3.3 Uji T

Ketika mencoba memahami bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya, uji T adalah alat yang berguna. Hipotesis kerja penelitian ini adalah:

- H1 : Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah
- H2 : Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah
- H3 : Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Tingkat kepercayaan 95%, alpha 0,05 Perhatikan nilai sig < 0,05 atau t hitung > t tabel dalam memutuskan menerima atau menolak hipotesis. Hal ini menunjukkan bahwa variabel x berpengaruh terhadap variabel y dan sebaliknya. Kesimpulan pengujian ini didasarkan pada t-hitung yang dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut:

$$T \text{ tabel} = T(\alpha/2; n-k-1)$$

$$T \text{ tabel} = T(0,025; 27) = 2.05183$$

Hasil dari pengujian menghasilkan nilai-nilai berikut:

Tabel 4. 2 Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1					
	(Constant)	-5,090	,289	17,595	,000
	X1	,022	,025	-,902	,375
	X2	-,017	,056	-,312	,757
	X3	-,179	,035	-5,185	,000

a. Dependent Variable: Y

dapat menyimpulkan hal berikut:

- a. Variabel Kemandirian Daerah (X1), diketahui sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,375 > 0,05 dan nilai t hitung -0,902 < 2.05183 yang memiliki arti bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, maka **H1 ditolak**.
- b. Variabel Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (X2), diketahui sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,757 > 0,05 dan nilai t hitung 0,312 < 2.05183 yang memiliki arti dapat disimpulkan bahwa efektivitas pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, maka **H2 ditolak**.

- c. Variabel Belanja Daerah (X3), diketahui sig untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $5,185 > 2,05183$ yang memiliki arti bahwa Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap terhadap kinerja keuangan daerah maka **H3 diterima**.

4.2.4 Hasil Regresi Linear Berganda

$$KKD = 5,090 - 0,022 RK - 0,017 EPAD - 0,179 BD + \epsilon$$

Berikut penjelasan rumus yang diberikan sebelumnya:

- Dengan konstanta adalah 5,090, hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen meliputi Kemandirian Daerah (X1), Efektivitas PAD (X2) dan Belanja Daerah (X3) bernilai 0 persen dan tidak mengalami perubahan, maka nilai kinerja keuangan daerah adalah senilai 5,090.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel kemandirian daerah (X1) yaitu sebesar -0,002, tidak searah dengan kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel kemandirian daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka variabel kinerja keuangan daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,022 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (X2) yaitu sebesar -0,017, tidak searah dengan kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel Efektivitas Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka variabel kinerja keuangan daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,017 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel belanja daerah (X3) yaitu sebesar -0,179, tidak searah dengan rasio kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel belanja daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka variabel kinerja keuangan daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,179 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan.

4.3 PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah pada seluruh pemerintah kota di provinsi Jawa Tengah, maka dapat dilakukan interpretasi hasil sebagai berikut:

4.4.1 Hubungan Kemandirian Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada seluruh Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023

Kemandirian Daerah dalam studi ini dihitung dengan mengkomparasikan pendapatan asli daerah dengan bantuan pemerintah pusat berdasarkan tabel 4.7 pada Uji T diketahui variabel rasio kemandirian daerah memiliki nilai t hitung sebesar 0,375 dengan taraf signifikasnsi sebesar -0,902 lebih besar dari tingkat kesalahan 5% atau sebesar 0,05 dan tidak melebihi t tabel sebesar 2,05183 yang memiliki arti bahwa rasio kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di seluruh pemerintah kota pada provinsi Jawa Tengah.

Maka dari hasil tersebut **H1 ditolak**, kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan di seluruh pemerintah kota pada Provinsi Jawa Tengah.

Kemandirian daerah menghitung kemampuan daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat, sehingga tingkat kemandirian daerah yang semakin baik menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat lebih kecil, dalam data yang tersaji kemandirian daerah tertinggi didapatkan oleh Kota Semarang pada

tahun 2023, namun tidak semata-merta hal tersebut berdampak langsung pada kinerja keuangan daerah kota Semarang yang semakin efisien pada tahun yang sama. Dalam hal ini kemandirian daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah yang diukur dari seberapa efisien pemerintah daerah mengeluarkan belanja untuk mendapatkan pendapatan sehingga perlu dilakukan penelaahan mengenai seberapa besar biaya pengumpulan yang diperlukan untuk mendapatkan PAD. Perlu adanya kesetimbangan antara biaya operasional yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima, sehingga ketepatan dalam penentuan sumber PAD secara riil sesuai aturan yang berlaku perlu dimaksimalkan dan biaya operasional dapat ditekan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan anggapan yang diajukan, namun diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya seperti (Hakiki dkk., 2023) yang menyatakan bahwa tingginya kemandirian daerah belum mampu membuat peningkatan pada nilai kinerja keuangan daerah pada wilayah tersebut. Tetapi penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh (G.Taek, 2019) yang berhasil membuktikan adanya pengaruh kemandirian daerah terhadap kinerja keuangan daerah di wilayah tersebut.

4.4.2 Hubungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada seluruh Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dalam studi ini dihitung dengan mengkomparasikan antara realisasi dibandingkan dengan target pendapatan asli daerah berdasarkan tabel 4.7 pada Uji T diketahui variabel efektivitas pendapatan

asli daerah memiliki nilai t hitung sebesar 0,757 dengan taraf signifikansi sebesar -0,312 lebih besar dari tingkat kesalahan 5% atau sebesar 0,05 dan tidak melebihi t tabel sebesar 2,05183 yang memiliki arti bahwa efektivitas pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di seluruh pemerintah kota pada provinsi Jawa Tengah. Maka dari hasil tersebut **H2 ditolak**, efektivitas pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan di seluruh pemerintah kota pada Provinsi Jawa Tengah.

Efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan membandingkan antara target dan realisasi pendapatan asli daerah, dalam data yang tersaji Kota Magelang memiliki efektivitas PAD yang cukup baik, karena selalu dapat melampaui target pendapatan mereka, namun pencapaian PAD melebihi target tersebut tidak dibarengi dengan belanja operasional yang baik, sehingga kinerja keuangan yang muncul masih belum efisien. Seringkali terdapat deviasi antara realisasi dan target pendapatan asli daerah, realisasi PAD bersifat fluktuatif sangat bergantung pada kondisi ekonomi tahun berjalan. Disisi lain kinerja keuangan daerah dihitung dari seberapa efisien pemerintah daerah mengeluarkan belanja untuk meniadakan pendapatan, maka terjadi perbedaan kecenderungan komponen pendukung dimana pos belanja sifatnya lebih konstan karena anggaran terealisasi merupakan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan 1 tahun sebelum anggaran belanja dan pada setiap pos adalah batasan tertinggi pengeluaran.

Hal tersebut menyebabkan adanya peluang kelebihan realisasi atas target PAD tidak langsung dibelanjakan pada tahun berjalan, sehingga realisasi PAD tidak selalu berdampak pada belanja yang dilakukan pada tahun tersebut. Untuk

meminimalisir hal tersebut pemerintah daerah perlu menaksir target PAD secara lebih realistis, sehingga penganggaran yang dilakukan disisi pos belanja dan pendapatan dapat memprediksi arah ekonomi di masa mendatang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya seperti (D.Ratmasari, D.Meirini, 2022) yang menyatakan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah belum mampu membuat peningkatan pada nilai kinerja keuangan daerah pada wilayah tersebut. Tetapi penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh (A.Rahmalita, 2023) yang menyatakan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah pada wilayah tersebut.

4.4.3 Hubungan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada seluruh Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023

Belanja Daerah dalam studi ini dihitung dengan membuat rasio perbandingan antara belanja modal dengan belanja total daerah berdasarkan tabel 4.7 pada uji t diketahui variabel belanja daerah memiliki nilai t hitung sebesar 5.185 dengan taraf signifikasinsi 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan 5% atau sebesar 0,05 dan melebihi t tabel senilai 2.0518 yang memiliki arti bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan di seluruh pemerintah kota pada Provinsi Jawa Tengah. Maka dari hasil tersebut **H3 diterima**, artinya peningkatan belanja daerah berpengaruh untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah, arah berlawanan dalam persamaan ini adalah karena kinerja keuangan daerah diukur menggunakan rasio efisiensi maka semakin rendah presentase yang muncul mengindikasikan kinerja keuangan daerah semakin baik.

Banyaknya dana yang dialokasikan untuk belanja modal dapat mewujudkan terciptanya infrastruktur dan sarana yang semakin banyak pula. Semakin banyak pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah sehingga peningkatan pertumbuhan kinerja keuangan daerah dapat tercipta. Keberhasilan dari setiap kegiatan belanja modal tidak hanya diukur dari segi pertumbuhan pendapatan daerah tetapi juga dari segi mutu yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan, sesuatu yang dihasilkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, pelaksanaan kegiatan belanja modal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kegiatan belanja modal mengarah pada kepentingan publik, dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan belanja modal tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya sehingga hal tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat, sehingga aset dan layanan yang lebih baik meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan potensi pendapatan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya seperti (Hakiki dkk., 2023) mengatakan bahwa terdapat pengaruh hubungan yang signifikan namun tidak searah antara belanja daerah dan kinerja keuangan dimana kenaikan rasio belanja daerah akan membuat efisiensi kinerja keuangan semakin baik. Tetapi kesimpulan ini tidak mendukung penelitian dari (Atmoko Khairudin, 2022) yang menyatakan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023. Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga H1 ditolak.
2. Variabel efesiensi pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga H2 ditolak
3. Variabel belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, dapat dikatakan bahwa peningkatan belanja daerah dapat mendukung kinerja keuangan daerah, sehingga H3 diterima.
4. Hasil uji F pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terhadap variabel terikat kinerja keuangan daerah (Y) terdapat pengaruh variabel bebas kemandirian daerah (X1), Efektivitas PAD (X2) dan Belanja Daerah (X3). Pada studi ini uji R square besarnya adalah 0,508 yang memiliki arti variabel independen yang terdiri atas kemandirian daerah, EPAD dan Belanja Daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah sebesar 50,8%.

5.2 IMPLIKASI

1) Bagi penelitian selanjutnya

(1) Diharapkan peneliti dapat mengambil objek yang berbeda dari daerah di seluruh Indonesia.

(2) Untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah, akan sangat membantu jika memasukkan variabel-variabel tambahan.

2) Bagi pemerintah

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan informasi ini sebagai batu loncatan untuk mendapatkan ide, inspirasi, dan penilaian guna menyusun rencana, kebijakan, dan inisiatif yang lebih baik guna meningkatkan perekonomian daerah.

5.3 KETERBATASAN PENELITIAN

Setelah melakukan analisis terhadap data, penulis menemukan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Salah satu keterbatasan tersebut adalah bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan tidak disajikan dalam bentuk angka nominal secara lengkap. Sebaliknya, data yang tersedia telah dibulatkan hingga satuan milyar rupiah. Akibatnya, hasil penelitian ini tidak dapat sepenuhnya merepresentasikan kondisi nyata dari kinerja keuangan pemerintah daerah secara akurat.

5.4 AGENDA PENELITIAN MENDATANG

Hasil dari penelitian ini serta keterbatasan-keterbatasan yang telah ditemukan dalam penelitian dapat dijadikan sumber ide bagi penelitian selanjutnya, dimana diperlukan adanya sumber data yang dapat menunjukkan secara lebih spesifik nominal keuangan dalam Laporan Realisasi Keuangan Daerah. Serta diperlukan adanya pengembangan variable-variabel yang dapat memperkaya dan memperkuat faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah. Kemudian penulis juga menyarankan peneliti selanjutnya untuk memperluas objek penelitian agar hasilnya dapat lebih baik dan spesifik dalam menjelaskan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, C. A., & Khairudin, K. (2022). Dampak Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 291–296. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1295>
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Badan Penerbit.
- Hakiki, D., Tumija, & Agustina, I. (2023). Rasio Kemandirian Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Author. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 10(1), 56–78. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP>
- Halim, A., 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Dalam Devita, A., Delis, A. & Junaidi, 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(2).
- Hamzah, A. (2007). Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten Dan 9 Kota Di Propinsi Jawa Timur Periode 2001-2006. <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>
- Lathifa, H., & Haryanto. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 17–32. <https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1106>
- Nilam Kencana Ningrat, C. I., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 683. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p15>
- Ningsih, A. T. 2010. Analisis Faktor Keuangan dan Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). Universitas Sebelas Maret.
- Nyoman, D., Astiti, Y., Sri, N. P., & Mimba, H. (2016). Pengaruh Belanja Rutin Dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

- Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Rahmalita, A. (2023). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Saat Pandemi Covid-19.
- Ratnasari, D., & Meirini, D. (2022). PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, SILPA dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Timur. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1189. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i05.p06>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian, Kualitatif, dan R%D. CV. Alfabeta.
- Taek, G. M. (2019). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektivitas PAD terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun. *Skripsi*, November.
- Wahyudin, I., & Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarj/article/view/2364>
- Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 465–472. <https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.1161>

